



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5167);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN WONOSOBO  
 dan  
 BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 903.518.946.968,- bertambah sejumlah Rp. 120.593.791.505,- menjadi Rp 1.024.112.738.473,- dengan perincian sebagai berikut :

|  |    |                   |    |                     |
|--|----|-------------------|----|---------------------|
| 1. Pendapatan                                    |    |                   |    |                     |
| a. Semula  | Rp | 865.395.513.018,- |    |                     |
| b. Bertambah                                     | Rp | 97.993.481.048,-  |    |                     |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan              |    |                   | Rp | 963.388.994.066,-   |
| 2. Belanja                                       |    |                   |    |                     |
| a. Semula  | Rp | 893.768.946.968,- |    |                     |
| b. Bertambah                                     | Rp | 120.897.791.505,- |    |                     |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan                 |    |                   | Rp | 1.014.666.738.473,- |
| Defisit setelah perubahan                        |    |                   | Rp | ( 51.277.744.407,-) |
| 3. Pembiayaan                                    |    |                   |    |                     |
| a. Penerimaan                                    |    |                   |    |                     |
| 1) Semula  | Rp | 38.123.433.950,-  |    |                     |
| 2) Bertambah                                     | Rp | 22.600.310.457,-  |    |                     |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan              |    |                   | Rp | 60.723.744.407,-    |
| b. Pengeluaran                                   |    |                   |    |                     |
| 1) Semula  | Rp | 9.750.000.000,-   |    |                     |
| 2) Berkurang                                     | Rp | (304.000.000),-   |    |                     |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan             |    |                   | Rp | 9.446.000.000,-     |
| Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan        |    |                   | Rp | 51.277.744.407,-    |
| Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan |    |                   | Rp | ---,-               |

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |   |    |                     |    |                   |
|---|----|---------------------|----|-------------------|
| a. Pendapatan asli daerah                                     |    |                     |    |                   |
| 1) Semula   | Rp | 60.314.879.680,-    |    |                   |
| 2) Bertambah  | Rp | 1.003.626.041,-     |    |                   |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan               |    |                     | Rp | 61.318.505.721,-  |
| b. Dana Perimbangan   |    |                     |    |                   |
| 1) Semula   | Rp | 590.120.642.787,-   |    |                   |
| 2) Berkurang  | Rp | ( 6.629.228.073,- ) |    |                   |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan                     |    |                     | Rp | 583.491.414.714,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah                       |    |                     |    |                   |
| 1) Semula   | Rp | 214.959.990.551,-   |    |                   |
| 2) Bertambah  | Rp | 103.619.083.080,-   |    |                   |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan |    |                     | Rp | 318.579.073.631,- |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |    |                 |    |                  |
|---|----|-----------------|----|------------------|
| a. Pajak Daerah                           |    |                 |    |                  |
| 1) Semula                                 | Rp | 6.150.500.000,- |    |                  |
| 2) Bertambah                              | Rp | 235.465.031,-   |    |                  |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan     |    |                 | Rp | 6.385.965.031,-  |
| b. Retribusi Daerah                       |    |                 |    |                  |
| 1) Semula                                 | Rp | 9.750.633.500,- |    |                  |
| 2) Bertambah                              | Rp | 3.006.512.700,- |    |                  |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan |    |                 | Rp | 12.757.146.200,- |

|   |   |    |                   |
|---|---|----|-------------------|
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  |   |    |                   |
| 1)  | Semula  | Rp | 5.656.852.000,-   |
| 2)  | Bertambah   | Rp | 104.218.832,-     |
|   | Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan                  | Rp | 5.761.070.832,-   |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  |   |    |                   |
| 1)  | Semula  | Rp | 38.756.894.180,-  |
| 2)  | Berkurang   | Rp | (2.342.570.522,-) |
|   | Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan                          | Rp | 36.414.323.658,-  |
| (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :                     |   |    |                   |
| a. Dana Bagi Hasil  |   |    |                   |
| 1)  | Semula  | Rp | 41.784.329.787,-  |
| 2)  | Berkurang   | Rp | (6.339.901.073,-) |
|   | Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan  | Rp | 35.444.428.714,-  |
| b. Dana Alokasi Umum  |   |    |                   |
| 1)  | Semula  | Rp | 486.041.113.000,- |
| 2)  | Berkurang   | Rp | (274.727.000,-)   |
|   | Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan  | Rp | 485.766.386.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus  |   |    |                   |
| 1)  | Semula  | Rp | 62.295.200.000,-  |
| 2)  | Berkurang   | Rp | (14.600.000,-)    |
|   | Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan  | Rp | 62.280.600.000,-  |
| (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : |   |    |                   |
| a. Pendapatan Hibah   |   |    |                   |
| 1)  | Semula  | Rp | 7.500.000.000,-   |
| 2)  | Bertambah   | Rp | 0,-               |
|   | Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan   | Rp | 7.500.000.000,-   |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak  |   |    |                   |
| 1)  | Semula  | Rp | 18.970.263.551,-  |
| 2)  | Bertambah   | Rp | 0,-               |
|   | Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan  | Rp | 18.970.263.551,-  |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  |   |    |                   |
| 1)  | Semula  | Rp | 117.431.107.000,- |
| 2)  | Bertambah   | Rp | 33.196.543.080,-  |
|   | Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan                                | Rp | 150.627.650.080,- |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya   |   |    |                   |
| 1)  | Semula  | Rp | 71.058.620.000,-  |
| 2)  | Bertambah   | Rp | 70.422.540.000,-  |
|   | Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp | 141.481.160.000,- |

## Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |    |   |    |                   |                   |
|----|---|----|-------------------|-------------------|
| a. | Belanja Tidak Langsung                          |    |                   |                   |
|    | 1) Semula                                       | Rp | 527.539.350.543,- |                   |
|    | 2) Bertambah                                    | Rp | 36.024.299.080,-  |                   |
|    | Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp |                   | 563.563.649.623,- |
| b. | Belanja Langsung                                |    |                   |                   |
|    | 1) Semula                                       | Rp | 366.229.596.425,- |                   |
|    | 2) Bertambah                                    | Rp | 84.873.492.425,-  |                   |
|    | Jumlah belanja langsung setelah perubahan       | Rp |                   | 451.103.088.850,- |
- (2) Belanja tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- |    |   |    |                   |                   |
|----|---|----|-------------------|-------------------|
| a. | Belanja Pegawai                                   |    |                   |                   |
|    | 1) Semula   | Rp | 457.016.361.575,- |                   |
|    | 2) Bertambah                                      | Rp | 32.049.016.080,-  |                   |
|    | Jumlah belanja pegawai setelah perubahan          | Rp |                   | 489.065.377.655,- |
| b. | Belanja Hibah                                     |    |                   |                   |
|    | 1) Semula   | Rp | 21.712.488.968,-  |                   |
|    | 2) Bertambah                                      | Rp | 3.725.283.000,-   |                   |
|    | Jumlah belanja hibah setelah perubahan            | Rp |                   | 25.437.771.968,-  |
| c. | Belanja Bantuan Sosial                            |    |                   |                   |
|    | 1) Semula   | Rp | 2.352.500.000,-   |                   |
|    | 2) Bertambah                                      | Rp | 250.000.000,-     |                   |
|    | Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan   | Rp |                   | 2.602.500.000,-   |
| d. | Belanja Bantuan Keuangan                          |    |                   |                   |
|    | 1) Semula   | Rp | 45.458.000.000,-  |                   |
|    | 2) Bertambah                                      | Rp | 0,-               |                   |
|    | Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp |                   | 45.458.000.000,-  |
| e. | Belanja Tidak Terduga                             |    |                   |                   |
|    | 1) Semula   | Rp | 1.000.000.000,-   |                   |
|    | 2) Bertambah                                      | Rp | 0,-               |                   |
|    | Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan    | Rp |                   | 1.000.000.000,-   |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- |    |  |    |                   |                   |
|----|--|----|-------------------|-------------------|
| a. | Belanja pegawai                                  |    |                   |                   |
|    | 1) Semula  | Rp | 6.776.309.900,-   |                   |
|    | 2) Bertambah                                     | Rp | 364.349.200,-     |                   |
|    | Jumlah belanja pegawai setelah perubahan         | Rp |                   | 7.140.659.100,-   |
| b. | Belanja barang dan jasa                          |    |                   |                   |
|    | 1) Semula  | Rp | 220.785.323.525,- |                   |
|    | 2) Bertambah                                     | Rp | 21.681.206.935,-  |                   |
|    | Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp |                   | 242.466.530.460,- |
| c. | Belanja modal                                    |    |                   |                   |
|    | 1) Semula  | Rp | 138.667.963.000,- |                   |
|    | 2) Bertambah                                     | Rp | 62.827.936.290,-  |                   |
|    | Jumlah belanja modal setelah perubahan           | Rp |                   | 201.495.899.290,- |

## Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp 38.123.433.950,-
    - 2) Bertambah Rp 22.600.310.457,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 60.723.744.407,-
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp 9.750.000.000,-
    - 2) Berkurang Rp (304.000.000,-)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 9.446.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun Anggaran sebelumnya
    - 1) Semula Rp 36.493.433.950,-
    - 2) Berkurang Rp (899.689.543,-)

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 35.593.744.407,-
  - b. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah
    - 1) Semula Rp 0,-
    - 2) Bertambah Rp 25.000.000.000,-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah dan obligasi setelah perubahan Rp 25.000.000.000,-
  - c. Penerimaan piutang daerah
    - 1) Semula Rp 130.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp 0,-

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp 130.000.000,-
  - d. Penerimaan Lain-lain
    - 1) Semula Rp 1.500.000.000,-
    - 2) Berkurang Rp (1.500.000.000,-)

Jumlah penerimaan lain-lain setelah perubahan Rp 0,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
    - 1) Semula Rp 8.250.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp 1.196.000000,-

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp 9.446.000000,-
  - b. Pengeluaran Lain-lain
    - 1) Semula Rp 1.500.000.000,-
    - 2) Berkurang Rp (1.500.000.000,-)

Jumlah pengeluaran lain-lain setelah perubahan Rp 0,-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan ; dan atau
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Kriteria belanja dalam keadaan darurat atau untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 14 Oktober 2011

B U P A T I W O N O S O B O ,

Cap. Ttd

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 15 Oktober 2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO,

Cap. Ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO

  
WINARNINGSIH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650604 199003 2 007

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ..... Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Tanggal : ... Oktober 2011

Diundangkan tanggal : ..... Oktober 2011

Lembaran Darah Kab. Wonosobo Tahun 2011 Nomor .....

2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Tanggal : ..... Oktober 2011

Diundangkan tanggal : .... Oktober 2011

Berita Darah Kab. Wonosobo Tahun 2011 Nomor ..

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ..... Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Tanggal : ... Oktober 2011

Diundangkan tanggal : ..... Oktober 2011

Lembaran Darah Kab. Wonosobo Tahun 2011 Nomor .....

2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Tanggal : ..... Oktober 2011

Diundangkan tanggal : .... Oktober 2011

Berita Darah Kab. Wonosobo Tahun 2011 Nomor ..

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ..... Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Tanggal : ... Oktober 2011

Diundangkan tanggal : ..... Oktober 2011

Lembaran Darah Kab. Wonosobo Tahun 2011 Nomor .....

2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Tanggal : ..... Oktober 2011

Diundangkan tanggal : .... Oktober 2011

Berita Darah Kab. Wonosobo Tahun 2011 Nomor ..

